

**PERILAKU POLITIK TIDAK MEMILIH MASYARAKAT  
KECAMATAN TAMPAN DALAM PILKADA  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2011**

**ABSTRAK**

**Arianto Azis**

**(Bangrianazis@yahoo.co.id)**

**Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tentang perilaku politik Tidak Memilih Masyarakat Kecamatan Tampan Dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011. Kecamatan Tampan pada Pemilu pada Kota Pekanbaru tahun 2011 hanya memiliki tingkat partisipasi 45,2%, sehingga penulis tertarik untuk menganalisa tentang perilaku politik masyarakatnya. Adapun permasalahan didalam penelitian ini adalah Mengapa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pilkada kota Pekanbaru Tahun 2011 di kecamatan Tampan dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi (observasi) dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan demi mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan key informan pada penelitian ini.

Berdasarkan Analisis tentang perilaku politik Tidak Memilih masyarakat Kecamatan Tampan pada Pemilu pada Kota Pekanbaru 2011, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Tampan pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi yang rendah yakni hanya 45,2%. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku politik masyarakat Kecamatan Tampan yang tidak terlalu simpati dengan proses politik yang terjadi (Pemilu pada Kota Pekanbaru 2011). Adapun beberapa hal yang menyebabkan perilaku politik yang cenderung negative tersebut adalah faktor kesibukan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji politik yang biasa terjadi pada Pemilu pada, serta kurangnya pendidikan politik tentang esensi dari pentingnya Pemilu pada terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kecamatan Tampan.

Kata kunci : Perilaku Politik Tidak Memilih

## ***Political Behaviour Being Not Vote of District Tampan Community in Pekanbaru City Election on 2011***

### ***Abstract***

Arianto Azis

This study carried out to analyze the political behaviour being not vote of tampan district community in Pekanbaru city election on 2011. Tampan district community in pekanbaru city election on 2011 only had a participation rate of 45,2%, so the author is interested in analyzing the political behaviour of the society. As for the problem in this study is why many voters who are not using their right in pekanbaru city election on 2011 in tampan district and what factors that influence.

This study is qualitative study, the data collection techniques is descriptive analysis. This research uses documentation (observation) and interviews with key informants as an information object that aims to achieve the goal to get the information in this study. The type of data used in this study are primary and secondary data obtained from direct observation and interviews with key informants in this study.

Based on the analysis of the political behaviour being not vote of Tampan district community in Pekanbaru city election on 2011. It can be concluded that the public has a low rate of only 45,2% participations. It is caused by the political behaviour of the people who are not looking to sympathetic to political process that occurs (Pekanbaru City election 2011) as for some of the thing that cause political behaviour that tends to be negative are the factor of busyness community and public distrust of promises of political appointment are common in the elections, as well as lack of political education about the essence of the elections to the Tampan district community.

Key note : Political behaviour being not vote.

### ***Pendahuluan***

Penyelenggaraan PEMILU beserta hasilnya yang terlihat di dalam susunan anggota DPR dan MPR, untuk sebagian telah mengukuhkan budaya politik baru kepada masyarakat Indonesia, di samping itu sebagian lainnya mengukuhkan budaya politik yang sudah mengakar di dalam masyarakat Indonesia.

Perilaku politik dalam orientasi politik yang baru tersebut antara lain ditandai oleh tingkah laku politik yang sudah berakar kepada keperluan rezim, pemerintah dan

sistem politik akan legitimasi dan pengakuan masyarakat, dimana perilaku politik tersebut masih identik dengan kekerasan, pemaksaan kehendak, *black campaign* (fitnah) yang semuanya mengarah kepada proses menghalalkan segala cara dalam mencapai suatu tujuan. Peilaku politik yang menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas nantinya akan mengarah kepada budaya politik masyarakat setempat.

Dengan status sebagai Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan merupakan

lambung suara pada setiap pesta demokrasi yang berlangsung di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah Pilkada Kota. Kecamatan Tampan merupakan satu dari tiga belas kecamatan di Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan memiliki penduduk 80.068 (www.ensiklopedia.com) jiwa yang merupakan kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Selain itu Kecamatan Tampan juga memiliki wilayah terluas dari tiga belas kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga pada awal tahun 2012 Kecamatan Tampan diproyeksikan untuk melakukan pemerataan, walaupun hingga saat ini masih terbentur pada regulasi.

Ironisnya, partisipasi masyarakat Kecamatan Tampan dapat dikatakan cukup rendah. Data hasil rekapitulasi suara memaparkan hanya 37.545 jiwa atau 45,24% masyarakat Kecamatan Tampan yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu, ditambah lagi terdapat 536 suara yang merupakan suara tidak sah. Tingkat partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan perilaku politik masyarakatnya, karena perilaku politik ikut mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Menurut **Novel Ali**(1999;22)., di Indonesia terdapat dua kelompok golput *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukannya alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai

tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu ( Fadillah Putra, 2003 : 200 ). Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tampan pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 (45,2%) berkaitan erat dengan perilaku politik masyarakat Kecamatan Tampan khususnya tindakan nyata seperti pemberian hak

suara pada Pemilu-Pemilu sebelumnya yang juga sangat rendah. Ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab adanya Golput. *Pertama*, administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. *Kedua*, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. *Ketiga*, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. *Keempat*, kalkulasi rasional. Pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pemilu legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya (Eriyanto ; 2007).

Berikut hasil Rekapitulasi beberapa Pemilu yang berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selama kurun waktu 5 tahun :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Pemilu Di Kecamatan Tampan Tahun 2006-2011**

No	Pemilu	Rekapitulasi	Persentase (%)
1	Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2006	25.873	41,43
2	Pemilukada Provinsi Riau 2008	29.137	41,20
3	Pilpres tahun 2009	29.432	41,30
4	Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011	34.210	45,24

*Sumber: Data Olahan 2012*

Fenomena seperti yang telah dideskripsikan oleh tabel diatas melukiskan dengan jelas bahwa selama ini dari tahun 2006 hingga pada Perhelatan pesta demokrasi terakhir yang di adakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yakni Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tampan sangat rendah, dimana sangat dipengaruhi oleh perilaku politik masyarakatnya. Selain itu, perilaku politik tidak hanya dapat dilihat dari hasil akhir suatu pesta demokrasi, namun dapat juga dilihat keterlibatannya melalui sikap protes dan dukungannya terhadap suatu keputusan politik melalui tindakan nyata seperti demonstrasi (mendukung/menuntut).

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimana besarnya perilaku tidak memilih yang terjadi di kecamatan Tampan dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perilaku Politik Tidak Memilih Masyarakat Kecamatan Tampan Dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011.”

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Pada umumnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek

penelitian secara akurat. Pelaksanaan penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk deskriptif analisis data disajikan dalam bentuk analisa.

- a. Data dikumpulkan melalui informan, key informan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokan data menurut jenisnya.
- b. Data yang didapat dilapangan di padukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

### **Hasil Pembahasan**

#### **A. Penggunaan Hak Suara Oleh Pemilih Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011 di Kecamatan Tampan**

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru yang juga merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kota Pekanbaru serta memiliki penduduk terbanyak, sehingga dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, Kecamatan Tampan merupakan lumbung suara yang selalu menjadi target utama setiap peserta yang turut berkompetisi didalam pesta demokrasi tersebut. Berikut persentase penggunaan hak suara oleh masyarakat di 4 kelurahan yang ada di kecamatan Tampan :

**Tabel 2**  
**Daftar Persentase Masyarakat Tidak Memilih di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Pada Pilkada Kota Pekanbaru 2011**

No	Kecamatan	DPT	Tidak Memilih	Persentase (%)
1	Simpang Baru	16.015	8.806	54,98
2	Sidomulyo Barat	22.032	11.652	52,88
3	Tuah Karya	25.690	15.678	61,02
4	Delima	16.958	8.861	52,25
	TOTAL	80.695	44.997	54,76

Sumber: Data Olahan 2014

Tabel diatas menjelaskan bahwa setiap Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki tingkat persentase masyarakat yang tidak memilih(non voting behavior) sangat tinggi, yakni lebih dari 50% masyarakat dikecamatan Tampan tidak menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu.

Hampir disemua kelurahan yang ada di kecamatan Tampan cenderung memiliki perilaku tidak memilih diatas 50% pada pemilihan umum calon walikota dan wakil walikota kota pekanbaru seperti di Kelurahan Simpang Baru terdapat 16.015 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 8.320 jiwa dan perempuan 7.696 jiwa tetapi jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya di kelurahan tersebut 6.254 jiwa hanya 45,02% dari yg tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 8.806 jiwa.

Kelurahan Sidomulyo Barat daftar pemilih tetap 22.032 jiwa jumlah pemilih laki laki 11.194 dan perempuan 10.838 jiwa, jumlah yang memberikan hak pilih 9.945 jiwa, tidak memberikan hak pilih 11.625 jiwa.

Kelurahan Tuah Karya jumlah pemilih tetap 25.960 jiwa, jumlah pemilih laki laki 13.000 perempuan 12.063 jiwa, yang menggunakan hak pilih 12.709 jiwa dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 15.678 jiwa. Sementara di Kelurahan Delima jumlah pemilih tetap 16.958 jiwa laki-laki 8.610 perempuan 8.348 yang menggunakan hak pilih 8.049 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 8.861 jiwa. sekitar 52,25% masyarakat yang tidak memilih. (sumber: KPU kota Pekanbaru)

Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Simpang Baru sebesar 16.015 orang (yang terdaftar didalam Pemilih Tetap). Kelurahan yang paling banyak tidak memilih/tidak menggunakan hak suaranya adalah Kelurahan Tuah Karya sebanyak 15.678 orang (61,03%).

Pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011, Kecamatan Tampan hanya terdapat 34.726 suara atau memiliki tingkat partisipasi sebesar 43,3%. Sedangkan pada PSU Pilkada Kota Pekanbaru tingkat partisipasi di Kecamatan Tampan mengalami kenaikan walaupun masih tetap dibawah angka 50%, yakni sebesar 45,24%.

Hal ini tentunya sangat miris sekali mengingat Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang dikenal telah berkembang dengan sangat pesat, baik itu dilihat dari perspektif ekonomi, pembangunan, maupun social-budaya semakin tinggi tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat suatu daerah, maka semakin tinggi pula perilaku untuk memilih. Namun ironi yang terjadi di Kecamatan Tampan yang notabene merupakan daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup tinggi

dibandingkan dengan daerah lain yang terdapat di Provinsi Riau justru cenderung memiliki perilaku tidak memilih yang tinggi.

Padahal di Kecamatan Tampan sendiri terdapat institusi pendidikan perguruan tinggi diantaranya Universitas Riau dengan asumsi banyaknya kaum terpelajar yang tinggal di daerah tersebut dapat memberikan respon positif terhadap pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011 namun kenyataannya justru terbalik, tidak sedikit mahasiswa baik itu pendatang maupun mahasiswa yang memiliki kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pekanbaru yang harusnya memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat awam malah memberikan pandangan negative terhadap politik atau pilkada yang sedang berlangsung pada Tahun 2011.

#### **B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Hak Suara Masyarakat Kecamatan Tampan Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011.**

Berangkat dari beberapa penjelasan maka penulis secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu, faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu bersumber dari dalam dirinya, sedangkan eksternal alasan tersebut berasal dari luar dirinya, secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Table 3**  
**Faktor Internal dan Faktor Eksternal**

No.	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Psikologis	Administarasi
2	Sistem Politik	Teknis
3	Kepercayaan Politik	Politik
4	Latar Belakang Sosial Ekonomi	

## 1. Faktor Internal

### a. Faktor Psikologis

Faktor psikologi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan, tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadian

pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi. Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomie merujuk pada perasaan tidak berguna. Faktor Psikologis juga mempengaruhi masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam memberikan keputusan memberikan hak suaranya pada Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu. Dalam penelitian ini, masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merasa acuh tak acuh terhadap proses Pemilu pada tahun tersebut. Mereka merasa tidak akan ada perubahan yang berarti bagi mereka walaupun mereka memberikan hak suara pada proses pesta demokrasi tersebut.

**Ari** (Warga Kelurahan Simpang Baru) merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan tersebut yang tidak memberikan hak suaranya pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu, mengatakan bahwa:

*“tidak ada gunanya sama sekali apabila saya pergi ke TPS karena satu suara saya tidak terlalu berarti menurutnya, lebih baik istirahat dirumah dan mengerjakan tugas kuliah*

**Supriyadi** (Warga Kelurahan Tuah Karya) juga berpendapat demikian :

*“salah satu alasan saya untuk tidak datang pada pemilihan kepala daerah kota pekanbaru tahun 2011 adalah dikarenakan saya sangat kecewa dengan pemimpin pemimpin yang maju tersebut, bagi supriadi siapapun yang terpilih akan sama saja tidak akan berdampak dalam kehidupan sehari hari.*

#### **b. Sistem Politik**

Secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti adanya hubungan antara demokratis tidaknya sistem politik dengan kuantitas kehadiran atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Kenyataan menunjukkan kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemilu tidak secara jelas menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut.

Seperti yg dikatakan salah seorang responden **Asrul** (Warga kelurahan Sidomulyo Barat) :

*“saya tidak ikut memberikan hak pilih dikarenakan system yang mengakibatkan pemilu terjadi kedua kalinya (pemungutan suara ulang) dari segi anggaran menghabiskan uang Negara, kedua kontestan tidak memiliki sifat legowo, alangkah baiknya klo sudah kalah menerima kekalahan kalo tidak pemilihan kepala daerah dipilih saja oleh anggota dewan, mereka kan wakil kami”*

Hal lain juga dikatan oleh bpk **Asnawi** (warga kelurahan sidomulyo barat), seperti yang dikutip:

*”saya tidak memilih memiliki alasan bahwa saya mencurigai adanya praktek*

*praktek secara sistematis oleh penyelenggara pemilu mulai dari komisioner hingga setingkat PPS , lurah dan camat dimutasi penyelenggara tingkat PPK smpai PPS diatur sedemikian rupa sehinga saya tidak percaya, percuma memilih tapi sudah diatur siapa pemenangnya sama saja demokrasi bohong.*

Pelaksanaan proses pesta demokrasi bagi masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru bukan merupakan hal baru, karena sebelumnya telah dilaksanakan Pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu, Legislatif, Pilpres maupun Pemilukada Kota Pekanbaru sebelumnya. Karakteristik dan psikologi pemilih masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru seperti yang dijelaskan sebelumnya memang acuh tak acuh terhadap proses Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011. Apalagi adanya kecurigaan kecurigaan masyarakat atas penyelenggara dan system pemilu yang mereka anggap jauh dari kata fair Namun pada setiap wawancara bersama informan yang juga merupakan masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menunjukan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa tanggal 18 Mei 2011 dan 21 desember (PSU) merupakan Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011, sehingga mereka tidak memberikan hak suaranya dikarenakan memiliki alasan dan rasionalisasi masing-masing, salahsatunya mengarah kepada Sistem Pemilu, mulai dari ketidakpercayaan terhadap oknum oknum penyelenggara hingga kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui

calon-calon yang berkompetisi pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu.

### c. Kepercayaan Politik

Dalam konteks perilaku non-voting, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi perilaku pemilih, ikut serta dalam pemilihan atau hanya sekedar menjadi penonton karena ketidakpercayaan individu terhadap politik, terlebih dalam pemilihan kepala daerah kota Pekanbaru pada tahun 2011 dilangsungkan dua kali, adanya permasalahan sehingga diadakannya proses pemungutan suara ulang, sehingga peristiwa ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap politik atau tokoh politik yang sedang berusaha mengambil simpati masyarakat dengan janji politik.

**Darmis**(Warga Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) yang di wawancarai di rumahnya pada mengatakan dalam wawancara bersamanya bahwa pada Pemilu Kota Pekanbaru lalu ia hanya di rumah. Berikut petikan wawancara bersamanya:

*“saya tidak datang ke TPS menurut saya adanya salah satu kandidat yang merupakan istri dari gubernur saya beranggapan bahwa pencalonan Septina Rusli tersebut hanya ingin membangun dinastinya saja mengumbar janji politik, sementara itu firdaus saya sedikit mengenalnya karena saya dari kalangan kontraktor sudah rahasia umum dikalangan kontraktor bahwa adanya dugaan upeti proyek kala itu firdaus sebagai kepala dinas pekerjaan umum kota*

*pekanbaru, jika saja ada calon alternative lain maka saya lain cerita”*

Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan masyarakat bahwa nantinya terdapat rezim dinasti di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, juga ketidakpercayaan terhadap pemimpin yang selama ini berkuasa. Dan tidak adanya alternatif pilihan lain selain dua pasang kandidat tersebut.

### d. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator untuk menjelaskan status sosial ekonomi yaitu pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Terdapat beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih. Pertama, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ketiga, pendapatan yang tinggi memudahkan

orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kehadiran selalu menunjukkan arah yang berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu yang cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berpendidikan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Sementara itu hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat ketidakhadiran juga menunjukkan pola yang sama. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, para pemilih dengan latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa yang mempunyai "status menyilang" justru cenderung tidak memilih.

Seperti yang dikatakan **Nurul** (Warga Kelurahan Delima) :

*'saya tidak memilih memiliki alasan bahwa kewajiban untuk bekerja lebih prioritas, tidak adanya libur membuatnya harus bekerja, seharusnya pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada saat pemilu, kalo pun hanya jam masuk kerja sedikit dilonggarkan*

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Administrasi**

Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak

terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya.

Hal ini juga terjadi pada Pilkada Kota Pekanbaru lalu juga mempengaruhi masyarakat didalam memberikan hak suaranya. Dimana masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan undangan dari panitia penyelenggara (petugas KPPS), dan tidak adanya kartu identitas (KTP) kebanyakan masyarakat menambah deretan pemilih yang tidak bisa ikut dalam memberikan hak pilih secara otomatis termasuk kedalam golput. Secara administratif KTP merupakan rujukan dalam mendata dan membuat DPT, maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal enam bulan di satu tempat.

**Bakti**(Warga Kelurahan Tuah Karya)mengatakan bahwa:

*"Masih ada beberapa masyarakat yang yang tidak memiliki kartu identitas penduduk dan hal ini dapat mengurangi jumlah suara dalam pemilu karena masyarakat tidak bisa terdaftar di daftar pemilihan tetap. Dan mereka tidak mendapatkan kartu pemilihan."*

Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih dilakukan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus ditempel ditempat tempat strategis di wilayah tersebut agar dapat dilihat dan dibaca oleh calon pemilih, begitu juga dengan calon pemilih juga harus berinisiatif untuk melacak namanya

dalam daftar DPS tersebut. Jika belum terdaftar maka masyarakat memiliki hak untuk melapor kepada RT atau petugas pendataan yang sudah ditunjuk di wilayah tersebut. Sistem berbasis IT (penggunaan E-KTP) yg sudah diterapkan pemerintah sudah cukup bagus dalam meminimalisir angka DPT ganda tapi tampaknya belum berjalan maksimal.

Pada pesta demokrasi tersebut, menurut riauplus.com, merupakan yang paling rendah tingkat partisipasinya dalam pemilihan Kepala Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Pekanbaru dinilai gagal dalam penyelenggara Pilkada Kota Pekanbaru tersebut dikarenakan salah satu faktor utama adalah permasalahan administrasi dimana yang belum maksimal dimana masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pemilihan.

#### **b. Teknis**

Faktor teknis dalam hal ini menyangkut hal-hal teknis yang terjadi pada saat hari pemilihan, dimana masyarakat memiliki kesibukan lainnya, sehingga tidak dapat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Adanya pergantian anggota penyelenggara pemilu dari tingkat KPU hingga KPPS juga menyebabkan adanya permasalahan baru dalam faktor ini, yaitu kurangnya pengalaman penyelenggara (petugas KPPS). Lambatnya informasi dan kurang

mengerti terhadap aturan-aturan bagi pemilih maupun pemilih tambahan.

Masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan yang dikenal sebagai daerah industri kecil dan jasa di Kota Pekanbaru. Mayoritas profesi masyarakat Kecamatan Tampan adalah sebagai pedagang, berkebun dan juga bekerja sebagai supir angkutan umum. Hal ini tentunya juga mempengaruhi masyarakat pada saat di hari pemilihan dalam memberikan hak suaranya di TPS.

Pada hari Pemilihan tanggal 21 Mei 2011 maupun pada saat PSU, Kota Pekanbaru meliburkan semua pegawai, begitupula para pelaku usaha meliburkan karyawannya untuk dapat memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara sesuai dimana mereka terdaftar didalam DPT. Namun untuk para pelaku usaha kecil, seperti pedagang serta supir angkutan umum juga petani, mereka tidak merasakan yang namanya libur.

Apabila mereka tidak berjualan, menarik angkutan umum dan berkebun, maka mereka akan kehilangan pencarian. Sehingga mayoritas dari mereka memutuskan untuk tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yakni yang berdagang tetap berdagang, yang berkebun tetap berkebun dan yang mengais nafkah dari angkutan umum tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan akhirnya tidak ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Beberapa responden yang menyatakan dirinya tidak memilih atau memberikan hak suaranya baik itu pada saat Pilkada Kota Pekanbaru putaran pertama maupun pada saat PSU, menyatakan tidak datang ke TPS dikarenakan lebih memilih untuk mengais rezeki demi dapat memberikan keluarganya makan. Dan ada dengan memanfaatkan

momen libur dalam bekerja untuk pergi liburan disuatu tempat seperti beberapa responden yang sempat penulis wawancara sebelumnya.

**Fakhrur Rozi**(Warga Kelurahan Tuah Karya)mengatakan bahwa:

*“dikarenakan pada tanggal 21 desember moment pemilu dan hari itu perusahaan tempatnya bekerja meliburkan karyawan maka saya dan teman- teman sudah merencanakan liburan ke lua kota (sumbar)”*

### c. Politik

Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. Hal ini merupakan salahsatu penyebab masyarakat tidak memberikan hak suaranya atau yang biasa kita dengar dengan istilah “golput”. Masyarakat tidak menganggap penting tentang substansi dari pada memberikan hak suaranya pada setiap Pemilu khususnya Pilkada yang akan menentukan nasib mereka lima tahun kedepan, dimana Kepala Daerah yang terpilih nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang mau tidak mau harus dijalankan oleh masyarakat, karena kebijakan pemerintah (Kepala Daerah) bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat didaerah administrasinya dan bersifat memaksa, dimana setiap masyarakat harus menjalankannya.

Stigma politik itu kotor, kejam, menghalalkan segala cara dan sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat Tampan apalagi proses pemilukada pada Tahun 2011 merupakan proses pemilukada yang banyak menemukan kecurangan dan lain lain hingga terjadi proses gugatan ke mahkamah konstitusi.

Perihal seperti iniyang menyebabkan dimana masyarakat menjadi acuh terhadap politik, mekanisme politik sudah bukan merupakan barang baru yang terjadi di Indonesia, begitupula di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan. Hal ini juga terjadi tidak begitu saja, melainkan dipicu oleh hal-hal yang menyebabkannya.

Masyarakat yang pada hari ini menjadi acuh terhadap proses politik dikarenakan kekecewaan mereka terhadap proes politik itu sendiri, khususnya orang-orang yang dilahirkan dari proses politik itu. Mereka (masyarakat) menganggap siapapun yang terpilih akan sama saja, tidak akan membawa perubahan yang berarti didalam kehidupan mereka. Trauma masyarakat inilah yang pada akhirnya melahirkan sikap apatis dan acuh terhadap proses politik sehingga pada saat ini sering kali kita mendengar istilah “golput”. Bagi sebagai mereka yang acuh tersebut hal ini (fenomena golput) menjadi pilihan politik mereka. Terlebih dengan beredar isu negative terhadap kedua pasangan calon dimana salah satu pasangan calon merupakan istri dari gubernur yang dianggap ingin menciptakan dinasti kekuasaan, begitu juga terhadap pasangan lain merupakan mantan seorang kepala dinas yg disinyalir melakukan pemalsuan atas status pernikahan.

Kondisi- kondisi seperti yang penulis uraikan secara politik mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politis atau tim sukses suatu partai politik seperti yang masyarakat maksud, masih banyak politisi atau calon pemimpin yang

baik, tapi tidak banyak para calon pemimpin yang baik ini tenggelam dikalahkan oleh para politisi yang menggunakan segala cara.

### ***Kesimpulan dan Saran***

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan Analisis tentang perilaku politik masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada Pemilu Kota Pekanbaru 2011, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Tampan pada Pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011 terdapat perilaku masyarakat yang tidak memilih lebih tinggi daripada masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilu Kota Pekanbaru Tahun 2011. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku politik masyarakat Kecamatan Tampan yang tidak terlalu simpati dengan proses politik yang terjadi (Pilkada Kota Pekanbaru 2011).

Adapun beberapa hal yang menyebabkan perilaku politik yang cenderung negative tersebut berdasarkan beberapa faktor. Baik faktor internal (dari dalam pribadinya sendiri) maupun faktor eksternal (diluar pribadinya)

1. Yaitu faktor psikologi: menganggap tidak adanya perubahan signifikan jika ia ikut memberikan hak pilihnya, merasa tidak diuntungkan dalam pemilu tersebut
2. Faktor latar belakang social dan ekonomi, seperti kesibukan masyarakat bekerja, karena masalah ekonomi yang memaksa ia harus mencari rezeki.
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kandidat dan janji-janji politiknya (kepercayaan politik) yang biasa terjadi pada Pilkada,

4. Kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini pemerintah dan KPU. (sistem politik)
5. kurangnya pendidikan politik, kesadaran tentang esensi dari pentingnya Pemilu terhadap kelangsungan hidup masyarakat Kecamatan Tampan
6. Adanya masyarakat yang tidak terdata dalam DPT dan sedang berada diluar kota ketika pemilihan sedang berlangsung

#### **Saran**

Adapun berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu maupun pesta demokrasi lainnya.
2. Adanya dukungan pemerintah pada saat terjadinya proses pemungutan suara kepada masyarakat yang sedang bekerja dengan meliburkan hari kerja dengan merumuskan regulasinya.
3. Menanamkan pendidikan politik sejak usia dini agar nantinya tidak menjadi hal yang asing bagi masyarakat.
4. Bagi partai politik perlu adanya mengadakan kaderisasi terhadap masyarakat dan pembelajaran politik yang santun, tidak hanya pada masa pemilihan saja tetapi berkesinambungan
5. Masyarakat kota Pekanbaru khususnya Tampan seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya terhadap proses pemilihan umum terutama pada pemilihan Pilkada langsung walaupun efeknya tidak dirasakan secara langsung.

### **Daftar Pustaka**

- Budiarjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Giddens, A. (2000). *The third way the renewal of social democracy*. Malden: Blackwell Publisher Ltd.
- Hadari Nawawi. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan Nelson (terjemahan Sehat Simamora). (1990). *Partisipasi Politik di negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lexi J Moleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mas'ood, Mohtar dan Collin Mac Andrew. (1995). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press
- Micheal dan Philip, Althoff. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik (Terjemahan Kartini Kartono)*. Jakarta: CV Rajawali
- Sanit Arbi. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sastropoetro, R, A, Santoso. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Soetrisno, Lukman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius
- Subekti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Wirasarana Indonesia
- Sugiyono. (2001). *Statistik Penelitian Untuk Riset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. (1998). *Metode Penelitian Administratif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- [www.isi.co.id](http://www.isi.co.id) Golput Dalam Pilkada, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007, oleh Eriyanto